

IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH DITINJAU DARI ASPEK KETAHANAN NASIONAL

(Pidato Kapolri pada Sarnasdra III Tanggal 25 Juli 2002)

I. Otonomi Daerah Mendorong Kesejahteraan

Pendekatan pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai obyek memang sudah tidak pada tempatnya lagi, karena hal yang demikian tidak menumbuhkan bukan saja kreatifitas melainkan juga tanggung jawab sehingga Pemerintah yang selama ini bertindak sebagai subyek seringkali menjado sasaran tudingan atas berbagai kegagalan pembangunan. Berbagai kondisi keterbatasan dalam ketersediaan sumber-sumber daya serta berbagai faktor korelatif sebagai dampak negatif dari perkembangan global yang memberikan andil bagi kompleksitas permasalahan bangsa saat ini, harusnya memberikan motivasi bagi upaya untuk mendorong lebih intens peran serta masyarakat dalam pembangunan. Hanya dengan mengikut sertakan masyarakat juga selaku subyek pembangunan diharapkan akan dicapai berbagai keberhasilan pembangunan sesuai harapan dan cita-cita masyarakat.

Otonomi Daerah yang merupakan pembalikan dari sentralisasi Pembangunan Nasional ke arah Desentralisa-si, disamping merupakan

pengejawantahan dari pengakuan Pemerintah Pusat atas keanekaragaman potensi daerah untuk membangun dan penempatan masyarakat sebagai subyek pembangunan, diharapkan sekaligus mendorong terjadinya proses demokratisasi kelembagaan tidak hanya bagi Pemerintah Daerah melainkan bagi seluruh aparatur Pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

Terbukanya peluang yang lebar bagi tumbuhnya berbagai kreatifitas pembangunan yang bersumber atas berbagai potensi daerah, akan mendorong tercapainya peningkatan kesejahteraan dalam memenuhi hajat berbagai kebutuhan hidup masyarakat di berbagai daerah yang pada akhirnya akan bermuara kepada peningkatan kesejahteraan nasional secara keseluruhan.

II. Perspektif Pemeliharaan Kamtibmas dan Penegakan Hukum.

Keberhasilan penyelenggaraan Otonomi Daerah pada dasarnya akan sangat tergantung kepada berbagai aspek sebagai totalitas upaya dan kegiatan di Daerah, termasuk pula upaya pemeliharaan stabilitas

Keamanan di wilayah dalam mana aktifitas dan kegiatan aparaturnya Keamanan di wilayah digelar dengan berbagai kendala keterbatasannya.

Upaya untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat sebagai fungsi pemerintahan yang diembankan kepada Polri melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 merupakan kewajiban yang tidak mungkin ditawar, yang diwujudkan melalui kegiatan pemeliharaan Kamtibmas dan penegakan hukum melalui tampilan pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dalam rangka pencapaian stabilitas Keamanan dalam negeri sebagai *output*.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang menempatkan keanekaragaman potensi Daerah sebagai salah satu kekuatan penunjangnya, harus pula dilihat dalam perspektif kekhasan Daerah dengan berbagai karakteristik wilayah, masyarakat dan budayanya. Dalam kerangka itu pula membawa Polri kepada penyesuaian berbagai kegiatan operasional bagi penciptaan stabilitas Kamtibmas di wilayah.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang juga akan membuka berbagai peluang kemajuan dengan proses dan dinamikanya, mau tidak mau akan pula menumbuh-kembangkan berbagai faktor korelatif kriminogen dan faktual kriminalitas yang cenderung meningkat. Kondisi yang

menempatkan Polri dalam posisi serba sulit. Dukungan sumber daya yang relatif tidak meningkat dari waktu ke waktu, yang menghadapi keadaan pra Otonomi Daerah saja masih dalam serba kekurangan, kini Polri akan dihadapkan kepada tantangan tugas yang semakin berat dengan kondisi yang sama. Reformasi ke arah Polri yang profesional pada kenyataannya tidak cukup hanya dengan sekedar slogan penggeseran paradigma ke arah pengabdian masyarakat, melainkan membutuhkan pula dukungan sumber-sumber daya yang memadai dalam mendukung keberhasilan tugas-tugas operasional Polri di lapangan. Beberapa kasus ketidakberhasilan Polri menjalankan perannya secara optimal kurangnya tepat bila dikaitkan dengan keberadaan dan status Polri yang tidak berada di bawah Komando dan kendali Kepala Daerah. Lebih tepat apabila hal ini lebih disebabkan kondisi profesionalitas yang belum sepenuhnya bisa dicapai disamping berbagai kendala keterbatasan yang memang masih melekat erat dengan Institusi Kepolisian. Adalah lebih *urgent* untuk bersama-sama mencoba membicarakan masalah keterbatasan ini secara transparan dan mencari berbagai solusinya secara bijak khususnya agar berbagai kegiatan operasional Polri di

wilayah bisa terlaksana dengan dukungan sumber daya yang memadai. Dalam kaitan ini perlu diinformasikan tentang Kesepakatan Bersama yang telah disahkan antara Depdagri dan Polri dalam upaya dan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum, Harkamtib-mas dan penegakan peraturan perundang-undangan yang diharapkan dengan demikian akan lebih terjalin koordinasi dalam rangka pemeliharaan stabilitas keamanan guna mendukung kelancaran dan keberhasilan Otonomi Daerah.

III. Ketahanan Nasional dan Implementasi Otonomi Daerah.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang terdukung dengan kondisi stabilitas keamanan tidaklah secara langsung menjamin sepenuhnya peningkatan kekokohan Ketahanan Nasional, namun secara rasional, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta terpeliharanya stabilitas keamanan tentulah meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Tingkat kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah memberikan modal berharga bagi terciptanya dukungan terhadap segenap rencana dan upaya Pemerintah dalam memperkuat Ketahanan Nasional Indonesia. Yang menjadi masalah adalah Daerah dimana potensi sumber-sumber dayanya berada dalam kondisi

gantungan terhadap subsidi dari Pemerintah Pusat se-demikian besar, sudah barang tentu Daerah-Daerah ini tidak akan mampu meningkatkan kesejahteraannya secara signifikan, sementara wilayah lainnya meningkat dengan pesat.

Tingkat kesejahteraan yang rendah secara relatif akan berkorelasi dengan kondisi-kondisi stabilitas keamanan dimana faktor korelatif kriminogen yang timbul sebagai akibat dari rendahnya ketersediaan lapangan kerja dan tingginya tingkat pengangguran, tingkat pendapatan yang rendah dan lain-lain. Wilayah-wilayah yang demikian, rentan terhadap terjadinya berbagai kerusuhan sosial dengan berbagai faktor pemicunya. Tinggal masalahnya bagaimana pemerintah mampu memberikan keseimbangan yang relatif bagi seluruh Daerah Propinsi sehingga tingkat kesenjangan kesejahteraan yang terjadi tidak terlalu ekstrim yang dapat memicu kecemburuan sosial dikemudian hari. Tentulah yang terbaik adalah pemerataan pembangunan, pemeliharaan stabilitas Keamanan yang baik, terpeliharanya rasa keadilan serta keikutsertaan seluruh masyarakat sebagai subyek pembangunan yang akan meningkatkan Ketahanan Nasional.

Jakarta, 25 Juli 200